

**PENINGKATAN KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DALAM MEMELIHARA KEAMANAN LINGKUNGAN DI KECAMATAN SEMPU  
KABUPATEN BANYUWANGI**

Ahmad Firbian Fathoni  
NPP 31.0508  
Asdaf Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: [afirbian@gmail.com](mailto:afirbian@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Drs H. Khasan Effendy, M.Pd

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The lack of power of the social security services in Sempu District is a problem. The civil service police unit as a regional apparatus has the responsibility to enforce regional regulations and create regulations. This research aims to determine the increase in the capacity of community protection units by the community protection task force in maintaining environmental security in Sempu District, Banyuwangi Regency. Purpose:* This research aims to describe and analyze the capacity building of community protection units in Sempu District, Banyuwangi Regency, as well as to describe and analyze the efforts made by the community protection task force to increase the capacity of community protection units in Sempu District, Banyuwangi Regency. **Methods:** *In this research the author uses Grindle's capacity building theory using descriptive qualitative methods and using observation, interview and documentation techniques. The analytical tool in this research is the capacity building theory according to Grindle in Haryono (2012) which includes human resource development, organizational strengthening, and institutional reform. Results/Findings:* The results of this research show that the community protection task force has carried out its duties well, but in its implementation there are still several obstacles found ranging from budget, human resources and member selection. Therefore, the Regional Government of Banyuwangi Regency must optimize the capacity building of community protection units in overcoming existing obstacles so that community protection units can optimally assist in creating environmental security as well as peace and public order in the community. **Conclusion:** *The conclusion of this research is that increasing the capacity of community protection units in Sempu District, Banyuwangi Regency still needs to be optimized.* **Keywords:** *Increasing the Capacity of Community Protection Units, Community Protection Units*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang(GAP):** Kurang berdayanya satlinmas yang ada di Kecamatan sempu menjadi masalah . Satuan polisi pamong praja sebagai perangkat daerah memiliki tanggung jawab guna menegakkan peraturan daerah serta menciptakan trantibum. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat oleh satuan tugas perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan di

Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat yang ada di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh satuan tugas perlindungan masyarakat dalam peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. **Metode:** Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori peningkatan kapasitas Grindle dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori peningkatan kapasitas menurut Grindle dalam Haryono (2012) yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, serta reformasi kelembagaan. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa satuan tugas perlindungan masyarakat sudah melaksanakan tugasnya dengan baik namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan mulai dari anggaran, sumber daya manusia, dan seleksi anggota. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi harus mengoptimalkan peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam mengatasi hambatan yang ada sehingga satuan perlindungan masyarakat dapat membantu secara optimal dalam terciptanya keamanan lingkungan serta ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat. **Kesimpulan :** Kesimpulan penelitian ini yakni peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi masih harus di optimalkan. **Kata kunci:** Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat, Satuan Perlindungan Masyarakat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keamanan memiliki kaitan tersendiri terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Jika keamanan tercipta di suatu wilayah akan menimbulkan rasa tenteraman terhadap masyarakat, begitu juga dengan ketertiban yang juga akan menimbulkan rasa tenteram jika keadaan masyarakat dapat teratur secara baik. Berkaitan dengan hal itu dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 menjelaskan bahwasanya pemerintah memiliki urusan pemerintahan absolut yaitu keamanan yang dilaksanakan oleh POLRI dan dijelaskan juga pasal 12 menjelaskan juga urusan pemerintahan kongruen yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mengatur urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Urusan ini tentu saja dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

Kedua urusan ini saling berkaitan namun dalam pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakat tidak ikut untuk berpartisipasi aktif, untuk lingkup lingkungan desa maka dibentuklah satuan perlindungan masyarakat yang merupakan kelompok yang mempunyai anggota dari masyarakat desa atau kelurahan yang telah dipersiapkan dan juga dibekali ilmu pengetahuan juga ketrampilan dapat membantu dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat desa.

Satuan perlindungan masyarakat ini dulunya lebih dikenal dengan nama pertahanan sipil atau lebih dikenal dengan Hansip yang tugasnya difokuskan pada membantu keamanan dan pertahanan yang diartikan organisasinya dibawah garis komando Polisi dan ABRI, namun setelah masa reformasi berubah menjadi Linmas yang ditugaskan lebih kepada perlindungan masyarakat, ketentraman dan juga ketertiban masyarakat yang garis komandonya dibawah Satuan Polisi Pamong Praja.

Selama ini satlinmas telah ditegaskan dalam Permendagri No. 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat disitu disebutkan bahwa satlinmas merupakan organisasi yang dibentuk pemerintah desa atau kelurahan dan beranggotakan masyarakat yang sudah siap dan sudah

dibekali ilmu pengetahuan dan ketrampilan guna melaksanakan penanganan bencana, memelihara keamanan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa serta melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Satuan perlindungan masyarakat ini merupakan tanggung jawab dari Satuan Tugas Perlindungan masyarakat yang dijabat oleh Kepala Bidang Linmas hal ini tertera dalam Permendagri No. 26 Tahun 2020, Satgas Linmas dijelaskan dalam Pasal 9 yaitu Kepala Satgas Linmas, anggota Satgas Linmas. Satgas linmas di provinsi dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban. Anggota Satgas Linmas terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih secara selektif. Anggota Satgas Linmas memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh).

Kemudian penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan membentuk Satlinmas. Satlinmas dalam hal ini mempunyai tugas yaitu salah satunya memelihara keamanan lingkungan, keamanan lingkungan ini memiliki sistem yang merupakan sistem perlindungan untuk masyarakat di lingkungan dan sekitarnya baik itu dari gangguan kejahatan yang datang dari luar maupun wilayah itu sendiri. Dan yang paling terpenting dalam sistem keamanan lingkungan ini ialah peran aktif masyarakat melalui satlinmas

Sehingga perlu adanya pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia tiap anggota dari satlinmas ini dipengaruhi pada upaya peningkatan kapasitas satlinmas. Peningkatan kapasitas ini harus selaras dengan tugas satlinmas meliputi mengurangi dampak bencana, menjaga keamanan, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat, turut dalam kegiatan sosial masyarakat.

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Terdapat beberapa permasalahan dalam peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Faktor pertama yakni kondisi keamanan yang menurut data bahwasanya masih banyak gangguan keamanan lingkungan seperti pencurian. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena sistem keamanan lingkungan yang belum berjalan baik dikarenakan SDM anggota satlinmas yang masih rendah dapat dilihat dari data pendidikan yang ada bahwasanya anggota satlinmas belum banyak yang lulus dari SMA. Kurangnya penyerapan anggaran juga menjadi masalah karena terlihat dari data bahwasanya realisasi anggaran masih dibawah 50%. Jadi dapat dikatakan bahwa masalah yang diambil oleh peneliti ini yakni masalah peningkatan kapasitas satlinmas yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait satuan perlindungan masyarakat. Penelitian Nanda Ridzki Gumelar “Peran Satlinmas Dalam Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sleman Permendagri Nomor 84 Tahun 2014” menemukan bahwa implementasi Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat tidak sepenuhnya dilaksanakan secara optimal karena jumlahnya yang terbatas. sumber daya untuk melaksanakan infrastruktur dan sulitnya memperbaharui anggota Satlinmas, dimana sebagian besar anggota sudah tua (Gumelar, 2018). Kajian Joko Pramono, “Implementasi Perlindungan Masyarakat di Kota Surakarta (Studi Organisasi dan Pemberdayaan Unit Perlindungan Masyarakat)” menemukan bahwa Unit Perlindungan Masyarakat memenuhi rasa aman, yang merupakan tanggung jawab setiap negara terhadap dirinya sendiri. kepada warga negara dibentuk di bawah Satuan Polisi Pamong Praja (Pramono 2019). Kajian Isnaini Rasyid (Rasyid 2023) “Pemberdayaan Satlinmas melalui Satpol PP Sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Linmas di Kecamatan

Pangkalan Kerinci” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlinmas Kawasan Pangkalan Kerinci belum selesai dengan baik. Sementara itu, di daerah ini, kendala pemberdayaan Satlinmas adalah kurangnya sosialisasi Permendagri No 84 Tahun 2014, ketidaktahuan masyarakat terhadap Permendagri No 84 tahun 2014. Pada tahun 2014 anggaran pelaksanaan anggota Satlinmas terbatas, tidak ada pelatihan bagi anggota Satlinmas. Kajian ilmiah yang dilaksanakan oleh Geraldo Rival Wokas (Wokas 2022) *“Pemberdayaan Satlinmas Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Guna Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban di Kelurahan Ranotana Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara”* dengan hasil temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pemberdayaan Satlinmas di Kelurahan Ranotana sudah baik, walau masih terdapat hambatan seperti masalah pada penyediaan sumber daya dari pemerintah desa guna menunjang Siskamling. Kajian ilmiah oleh Wahid Rahmat Hidayat Muhammad Hasim (Hasim 2022) *“Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Satlinmas Guna meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Takalar”* peneliti mengemukakan hasil temuan yaitu hambatan yang ada mencakup dari terbatasnya dana untuk sarana dan prasarana anggota satlinmas dilapangan, kebijakan yang tumpang tindih untuk satlinmas yang dibentuk oleh kepala daerah karena ingin membentuk lembaga pengaman masyarakat di tingkat desa, dan kurang terlihatnya satlinmas disebabkan oleh tidak tersedianya seragam bagi anggota satlinmas.

#### **1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dan juga lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah yang berbeda dari penelitian Nanda Rizki Gumelar, Joko Pramono, Isnan Rasyid, Geraldo Rival Wokas, Wahid Rahmat Hidayat Muhammad Hasyim. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda yakni menggunakan teori dari Grindle (Hariyono 2012) yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas yang baik yaitu meliputi sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan lingkungan di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data (Rukajat 2018), memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Moleong 2011). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 orang informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai (Arikunto 2002). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi dan juga Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kecamatan Sempu serta anggota Satuan Perlindungan Masyarakat. Sementara dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono 2019)

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi teori yang dikemukakan oleh Grindle dalam (Hariyono 2012) hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas yang dilakukan ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

#### **3.1 Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Tujuan dari dimensi pengembangan sumber daya alam ini adalah ketersediaan tenaga profesional dan personal teknis, yang meliputi:

##### **3.1.1 Pelatihan**

Pelatihan merupakan kegiatan yang dapat memperoleh, meningkatkan dan pengembangan potensi dalam produktivitas pegawai dalam hal ini objeknya adalah anggota satlinmas yang dapat menghasilkan pegawai yang lebih disiplin dengan keterampilan dan kompetensi lebih baik (Haryati 2019), sehingga dalam pelatihan ini lebih menitikberatkan pada diperolehnya keterampilan dan juga disiplin yang ada dalam diri tiap anggota satlinmas tersebut. Pelatihan ini dilakukan kepada anggota Satlinmas yang berada di Kelurahan/Desa. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada Satgas Linmas Kecamatan sehingga dapat disimpulkan bahwasanya pelatihan anggota satlinmas di Kecamatan Sempu masih belum mencapai setengah dari jumlah Satlinmas di Desa, sehingga sebaiknya harus lebih menyeluruh pelatihan tersebut, juga perlu adanya pelatihan khusus sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan juga pengetahuan dan keterampilan khusus anggota satlinmas.

##### **3.1.2 Rekrutmen**

Rekrutmen merupakan proses guna mendapatkan calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan berdasar kualifikasi dan sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan (Mardianto 2014), yang tujuannya adalah dapat memiliki tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan, baik berdasarkan beban kerja yang ada maupun kebutuhan lain. Sehingga dalam indikator rekrutmen ini lebih menekankan pada terpenuhinya tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan Satlinmas. Rekrutmen ini dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan guna memenuhi anggota Satlinmas di tiap desa/kelurahan sehingga peneliti langsung melakukan wawancara kepada tiap Kepala Desa karena Desa lah yang melakukan rekrutmen ini. Peneliti menemukan dalam wawancara tersebut bahwasanya seluruh jenis rekrutmen yang ada adalah penunjukkan dari Kepala Desa melalui Kepala Dusun sehingga penting adanya sebuah seleksi terhadap calon satlinmas tidak hanya penunjukkan saja.

##### **3.1.3 Gaji**

Gaji merupakan pembayaran dan balas jasa yang diberikan kepada pegawai, karyawan, dan manajer sebagai konsekuensi dari sumbangan yang diberikan dalam pencapaian tujuan perusahaan ataupun organisasi. Perusahaan ataupun organisasi juga harus membedakan antara gaji dan upah. Gaji merupakan imbalan dari suatu organisasi atau perusahaan berdasar tingkat pendidikan, jabatan, dan masa kerja sedang upah berdasarkan waktu kerja juga volume yang dihasilkan seorang pegawai atau karyawan. Gaji merupakan hal yang penting terhadap satlinmas dan guna memberi balasan terhadap jasa atas kerja yang dilakukan dalam hal ini seharusnya memang dari anggaran desa sehingga peneliti melakukan wawancara terhadap tiap Kepala Desa di Kecamatan Sempu. Peneliti dalam wawancaranya kepada kepala desa menemukan bahwasanya gaji untuk satlinmas tiap desa di Kecamatan Sempu ini memang belum ada alokasi anggaran desa untuk itu memang seharusnya ada gaji setidak-tidaknya untuk memastikan keberadaan satlinmas merupakan sebuah profesi bukan hanya sukarela dari masyarakat saja.

##### **3.1.4 Kondisi Kerja**

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya gaji untuk satlinmas tiap desa di Kecamatan Sempu ini memang belum ada alokasi anggaran desa untuk itu memang seharusnya ada gaji setidak-

tidaknya untuk memastikan keberadaan satlinmas merupakan sebuah profesi bukan hanya sukarela dari masyarakat saja. Peneliti dalam wawancaranya menemukan bahwasanya di tiap desa di Kecamatan Sempu ini memiliki kondisi kerja yang kurang mendukung karena ronda malam tidak rutin dan kemudian untuk penanganan orang yang membutuhkan hanya ada di Kantor Desa yaitu anggota Satlinmas yang piket saja, kemudian rata-rata dari anggota satlinmas juga bekerja diluar keanggotaan satlinmas di siang hari sehingga ketika ada kegiatan kemasyarakatan satlinmas tidak bisa menunjukkan eksistensinya.

### **3.2 Penguatan Organisasi**

Dalam koordinasi yang disampaikan oleh (Moekijat 1994) di bukunya yang menjelaskan bahwasanya koordinasi adalah gabungan antara usaha dan peraturan dari semua kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam koordinasi terdapat beberapa indikator, yaitu:

#### **3.2.1 Sistem Insentif**

Sistem insentif ialah mekanisme atau rangkaian kebijakan yang direncanakan bisa memotivasi dan mendorong perilaku individu atau kelompok dengan memberikan hadiah dapat berupa bonus, penghargaan, komisi, promosi, ataupun pengembangan karir. Tujuan dari sistem insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kinerja keseluruhan dalam sebuah organisasi atau sistem. Sistem insentif ini seharusnya diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Linmas untuk skala Kabupaten yang kemudian Peneliti menemukan bahwasanya belum ada Sistem insentif yang tujuannya untuk memotivasi dan mendorong anggota Satlinmas untuk melakukan yang terbaik saat bekerja.

#### **3.2.2 Perlengkapan Personil**

Perlengkapan personil meliputi sarana dan prasarana yang berarti segala peralatan, perlengkapan kerja, dan juga fasilitas yang berguna sebagai alat pembantu dalam pelaksanaan kerja. Sarana yang dimaksudkan adalah seperti Seragam, sepatu, tongkat T, HT dan kemudian untuk prasarana adalah Poskamling. Perlengkapan personil inilah yang digunakan Satlinmas guna menunjang kegiatan dalam pelaksanaan tugas Satlinmas sehingga peneliti melakukan wawancara kepada tiap Kepala Desa di Kecamatan Sempu guna mendapatkan informasi mengenai sarana dan prasarana ini. Kemudian peneliti menemukan bahwasanya jumlah Poskamling aktif masih terbilang banyak dan kemudian untuk sarana pendukung seperti HT dan Tongkat T setiap piket jaga anggota Satlinmas sudah disediakan sehingga untuk sarana dan prasarana cukup memadai untuk menjaga keamanan lingkungan.

#### **3.2.3 Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan sikap dan perilaku individu yang memimpin kegiatan kelompok dengan tujuan yang diinginkan bersama. Satlinmas merupakan organisasi yang tentu saja memiliki sosok pemimpin yaitu kepala satuan atau satgas linmas yang berkedudukan memimpin dan bertanggung jawab atas Satlinmas dalam lingkup Kabupaten dan satgas Kecamatan yang dijabat oleh Kepala Sie bina linmas di Kecamatan dan juga di tingkat Desa/Kelurahan terdapat Kepala satuan tugas yang dijabat oleh lurah langsung. sehingga peneliti melakukan wawancara kepada kepala-kepala tersebut mengenai kepemimpinan yang ada. Kemudian peneliti menemukan bahwasanya Kepemimpinan ini adalah Satgas Linmas di tiap jenjang sebenarnya sudah berusaha untuk mulai meningkatkan eksistensi Linmas namun memang terbentur anggaran untuk melakukan pelatihan dan anggaran untuk seragam yang sesuai dengan Permendagri No. 26 Tahun 2020.

#### **3.2.4 Budaya Organisasi**

Budaya Organisasi merupakan kebiasaan yang terus berulang dan menjadi kebiasaan dan menjadi nilai dan gaya hidup dari suatu kelompok dan kemudian diikuti kelompok individu selanjutnya. Budaya dalam organisasi satlinmas ini yang kemudian ingin diteliti peneliti sehingga peneliti melakukan wawancara kepada anggota satlinmas. Peneliti juga melakukan observasi kepada tiap desanya guna menemukan keaktifan dari tiap desa dalam kegiatan

satlinmas ini sehingga ditemukan bahwasanya satlinmas memiliki budaya untuk melaksanakan piket di malam hari melakukan jaga namun disiang hari tugas dan fungsi beberapa desa masih belum dijalankan dengan baik. Kesimpulannya, anggota satlinmas hanya menunggu arahan dari perangkat desa untuk bekerjanya dan juga penjagaan seperti di poskamling memang dari masyarakat sehingga satlinmas tidak mengarahkan secara pasti sistem jaga nya kapan dan seperti apa.

### **3.2.5 Komunikasi**

Komunikasi merupakan sebuah proses pengiriman pesan dan informasi dari satu kelompok atau individu ke individu atau kelompok lain sehingga pesan dapat dimengerti. Komunikasi yang dimaksud disini adalah komunikasi dari organisasi Satlinmas kepada pihak lain guna melakukan koordinasi saat kegiatan, sehingga dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Satuan Tugas Linmas yang kemudian ditemukan bahwasanya yang didapatkan dari hasil wawancara tersebut ialah Satlinmas ini menjadi organisasi penting yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sehingga memang komunikasi merupakan hal yang penting, satlinmas sendiri memang sering berkomunikasi dengan pihak POLRI/TNI dan juga dari BPBD saat melakukan pelatihan penanganan bencana ataupun pelatihan yang lain, namun memang untuk komunikasi yang sifatnya untuk penjagaan keamanan lingkungan belum ada.

### **3.2.6 Struktur Manajerial**

Struktur manajerial merupakan kerangka kerja yang mengatur mengenai peran, kekuasaan, dan tanggung jawab dibagi merata dan dikelola dalam sebuah organisasi. Struktur manajerial masuk dalam menentukan informasi antar jenjang. Struktur manajerial membuat kemudahan dalam pengambilan keputusan, penentuan jalur komando, dan fasilitasi komunikasi efektif tiap anggota organisasi sehingga peneliti berkesimpulan berdasarkan hasil wawancara bahwasanya Satlinmas ini sudah memiliki sistem manajerial yang sudah baik dan berjenjang namun memang kendala komunikasi untuk masalah yang ada di desa tidak atau sulit dijangkau sehingga informasi susah sampai ke atas.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan peningkatan kapasitas satlinmas di Kecamatan Sempu bertujuan untuk mewujudkan satlinmas yang optimal dalam membantu terjaganya keamanan lingkungan. Peningkatan kapasitas ini sangat dibutuhkan, sebab kapasitas anggota satlinmas yang banyak masih belum sesuai dengan harapan. Oleh sebab itu, karena kurang berdayanya satlinmas perlu adanya peningkatan kapasitas. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perspektif pada semua penelitian sebelumnya tentang apa yang dilakukan Satgas Linmas dalam meningkatkan kapasitas, serta dalam penelitian sebelumnya hanya membahas satlinmas khususnya kapasitas anggota organisasi saja sehingga tidak membandingkan satlinmas dalam SDM, organisasi, dan juga reformasi kelembagaan di tiap desa dalam satu kecamatan.

Hasil temuan dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian Joko Pramono (Pramono 2022) yaitu hambatan satlinmas yaitu faktor sumber daya, ditemukan adanya keterbatasan sumber daya, dalam hal input SDM maupun anggaran. Anggaran yang terbatas membuat optimalisasi pengembangan kapasitas juga tidak optimal. Dukungan peralatan dan media dalam penyelenggaraan perlindungan kapasitas juga tidak optimal. Kemudian serupa yang dituangkan dalam jurnal tersebut Wokas dalam penelitiannya (Wokas 2023) menemukan bahwasanya hambatan yang mempengaruhi pemberdayaan Satlinmas, yaitu melalui penyediaan Sumber Daya. Perbedaannya hasil temuan pada penelitian ini terhadap penelitian Joko Pramono (Pramono 2023) dan juga penelitian Wahid Rahmat Hidayat h. (Hasim 2022) yaitu pada hasil temuan bahwasanya satlinmas ini memiliki hambatan pada setiap aspek karena anggaran sehingga masalah pada rekrutmen, pelatihan, dan juga partisipasi masyarakat, kemudian berdampak juga pada budaya kerja anggota satlinmas yang kurang baik karena gaji

yang kurang ini namun hal ini mulai diperbaiki oleh satgas linmas skala kabupaten dengan pengajuan anggaran lebih terkait pelatihan, dan juga dari satgas linmas desa untuk menganggarkan penggajian yang layak.

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat dalam peningkatan kapasitas satlinmas di Kecamatan Sempu ini yaitu kurangnya anggaran. Faktor penghambat kedua yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk turut ikut dalam satlinmas ataupun menjaga keamanan lingkungan, dan yang ketiga adalah belum sesuainya organisasi satlinmas dengan Permendagri 26 Tahun 2020 dan juga belum ada regulasi spesifik terkait Satlinmas di Kabupaten Banyuwangi.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa Peningkatan Kapasitas Satlinmas di Kecamatan Sempu dalam memelihara keamanan lingkungan di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi masih belum optimal dalam Pelatihan, rekrutmen, penggajian, kondisi kerja, budaya organisasinya. Kemudian juga upaya pertama dari Satgas Linmas melakukan sosialisasi rutin mengenai Permendagri 26 Tahun 2020 terkait Satlinmas kepada Pemerintah Desa, kemudian terkait anggaran, Satgas Linmas mengusulkan anggaran pelatihan rutin kepada para anggota satlinmas secara menyeluruh, yang ketiga Satgas Linmas mengadakan pertemuan dengan pihak lain untuk meningkatkan kapasitas satlinmas, dan yang terakhir dari Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk seragam dan perlengkapan personil yang sesuai dengan peraturan

**Keterbatasan Penelitian** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work)** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peningkatan kapasitas satlinmas di Kecamatan Sempu untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Camat Sempu beserta jajarannya dan Kepala Desa di tiap desa di Kecamatan Sempu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mengsucceskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023) *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Jakarta: PT. Nas Media Indonesia.
- Gumelar, N. R. (2018). *Peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Dalam Perlindungan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Di Kabupaten Sleman*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/12875>
- Grindle. (1997) *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston: MA, Harvard Institute for International Development.
- Rahman, A. (2011) *Peran dan Fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Ketertiban Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasyid I. (2023) *Pemberdayaan Satlinmas melalui Satpol PP Sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Linmas di Kecamatan Pangkalan Kerinci* <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/53503>
- Haryono, B. S., Sumartono, Zauhar, S., & Supriyono, B. (2012) *Capacity Building*. Malang: Universitas Brawijaya Press.



- Hasanah, H. (2016). Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial. *Jurnal At-Taqaddum*, 8, 1–46.
- Hasim, W. (2021). *Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Satlinmas Guna Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Takalar*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.  
<http://eprints.ipdn.ac.id/9026/1/RINGKASAN%20SKRIPSI.pdf>
- Moekijat. (1994). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Alumni.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardianto, H. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, D. 2015. *Satlinmas dalam Perspektif Keamanan dan Ketertiban di Masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramono Joko, & Kinasih, W. (2020). *Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kota Surakarta*. *Research Fair Unisri*, 4(1), 127–135.  
<https://doi.org/10.36085/jams.v2i1.4599>
- Prasetyo, B. (2014) *Satuan Perlindungan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approaches*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wokas, G. (2008). *Pemberdayaan Satlinmas Dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan Guna Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Di Kelurahan Ranotana Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.  
<http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6985>

